

Kuasa dan Politik Dinasti: Studi Keterpilihan Anak Kepala Desa Bua Sebagai Anggota Legislatif di Kabupaten Sinjai

Sartinayanti*, Muhammad Ramli, Fajar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Corresponding Author: sartinayanthi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses keterpilihan anak Kepala Desa Bua sebagai anggota legislatif di Kabupaten Sinjai pada Pemilu 2024, serta menganalisis peran kepala desa dalam membangun dinasti politik di tingkat lokal. Fenomena ini mencerminkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berakar pada relasi sosial dan kekeluargaan yang menguatkan praktik pewarisan kekuasaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault dan konsep familisme sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan anak kepala desa tidak semata-mata berdasarkan kapasitas individu, melainkan dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang dibentuk oleh posisi kepala desa sebagai patron. Dukungan politik diperoleh melalui jaringan kekuasaan, modal sosial, dan hubungan patron-klien yang terbangun di masyarakat desa. Selain itu, nilai-nilai familisme turut memperkuat legitimasi politik dalam lingkup keluarga. Kesimpulannya, praktik politik dinasti di Desa Bua memperlihatkan reproduksi kekuasaan melalui mekanisme sosial yang menghambat partisipasi politik yang inklusif dan kompetitif di tingkat desa.

Kata Kunci: Politik Dinasti; Kekuasaan; Kepala Desa; Familisme; Demokrasi Lokal

Pendahuluan

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk memengaruhi dan mengendalikan kebijakan publik, baik di tingkat pusat maupun desa. Di Indonesia, kekuasaan tidak hanya mencakup kemampuan untuk membuat dan menjalankan kebijakan, tetapi juga tanggung jawab terhadap wewenang yang dimiliki (Anzalia et al., 2023). Menurut Foucault, kekuasaan merupakan relasi yang tersebar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, di mana individu dapat berada dalam posisi mendominasi maupun didominasi (Kebung, 2018). Kekuasaan tidak bersifat statis, melainkan terus dibentuk, dipertahankan, bahkan diperebutkan. Ia hadir dalam relasi sosial yang saling memengaruhi, menjadikannya bagian dari dinamika masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan harus dipahami sebagai sesuatu yang aktif dan berkembang, bukan sekadar posisi formal atau legal semata (Nugroho et al., 2016). Dalam konteks Indonesia, praktik kekuasaan kerap menunjukkan pola yang berbasis pada hubungan kekerabatan. Salah satu contohnya adalah politik

Article history: Received 25/5/2025; Revised 11/7/2025; Accepted 12/7/2025; Published 12/7/2025



© The Author(s), 2025.

dinasti, yaitu pewarisan kekuasaan dalam lingkup keluarga. Meskipun demokrasi telah berjalan, praktik ini tetap marak di berbagai daerah, mencerminkan pola pewarisan kekuasaan masa kerajaan yang masih bertahan hingga kini. Elit lokal kerap mempertahankan kekuasaan dalam lingkup keluarganya, menjadikan politik dinasti sebagai bentuk reproduksi kekuasaan yang mengancam idealisme demokrasi (Lestario, 2022).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan luas kepada pemerintah desa. Kepala desa kini memiliki peran strategis tidak hanya secara administratif, tetapi juga sebagai aktor politik lokal. Mereka dapat membentuk jejaring kekuasaan dan memengaruhi preferensi politik masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, salah satu studi kasus yang relevan untuk dianalisis adalah keterpilihan anak Kepala Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024. Kemenangan ini bukan hanya mencerminkan popularitas pribadi calon, tetapi juga menggambarkan bagaimana pengaruh kekuasaan kepala desa berperan signifikan dalam membentuk pilihan politik masyarakat. Dalam konteks ini, praktik politik dinasti tampak bekerja melalui mekanisme relasi sosial, simbolik, dan kultural yang telah lama tertanam dalam masyarakat desa (Permana, 2022). Politik dinasti merupakan strategi untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara mengalihkan jabatan politik kepada individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dalam praktik ini, kekuasaan didistribusikan secara terbatas hanya kepada anggota keluarga atau kerabat sedarah, yang menciptakan hierarki kekuasaan berbasis kekerabatan. Di Indonesia, politik dinasti telah menjadi fenomena umum, termasuk di Sulawesi Selatan. Di wilayah ini, pewarisan kekuasaan dalam lingkup keluarga tidak hanya terjadi di tingkat provinsi atau kabupaten, tetapi juga merambah hingga ke tingkat desa. Dinasti politik ini berkontribusi terhadap konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir keluarga, yang berdampak pada terbatasnya akses bagi calon pemimpin lain. Kondisi ini dapat melemahkan prinsip demokrasi dan membuka peluang terhadap pemerintahan yang bersifat oligarkis serta penyalahgunaan kekuasaan (Azzahra & Sukri, 2022). Dalam konteks sosial-politik Sulawesi Selatan, pengaruh kekerabatan sangat kuat. Masyarakat sering kali lebih memilih pemimpin dari keluarga yang sudah terbukti memiliki rekam jejak kepemimpinan. Kepercayaan ini diperkuat oleh keberadaan modal sosial, seperti jaringan, reputasi, dan kedekatan emosional, yang mampu membangun modal politik yang kuat tanpa harus mengandalkan politik uang.

Modal sosial yang kokoh dapat memperkuat legitimasi seorang kepala desa dan mendorong terwujudnya kepemimpinan yang partisipatif dan visioner. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan, terutama dalam proses pengambilan keputusan

yang melibatkan semua elemen warga, termasuk kelompok miskin, minoritas, dan kelompok marjinal (Dwinugraha, 2020). Kuasa kepala desa yang menjadi pemimpin harus bertanggung jawab penuh dalam mensejahterakan masyarakat desanya.

Politik dinasti tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak dan kondisi yang mendukung (Permana, 2022). Politik dinasti di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Sinjai, terlihat nyata hingga tingkat desa. Kepala desa yang memiliki legitimasi dan modal sosial tinggi sering memengaruhi preferensi politik masyarakat untuk mendukung anggota keluarganya. Politik dinasti ini membentuk struktur sosial dan berdampak signifikan pada demokrasi lokal. Di Desa Bua, kepala desa memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya desa untuk mempertahankan dominasi politik keluarga. Program pembangunan dan bantuan sosial digunakan untuk membangun citra positif dan memperkuat loyalitas masyarakat melalui relasi patron-klien. Selain legitimasi sosial yang didasarkan pada hubungan kekerabatan dan partisipasi warga, kepala desa juga mengatur dukungan politik dengan strategi yang cermat serta penguasaan sumber daya lokal, sehingga pewarisan kekuasaan keluarga berlangsung secara informal dari generasi ke generasi.

Fenomena politik dinasti di Kabupaten Sinjai menunjukkan dinamika kekuasaan yang kompleks. Masyarakat menghargai kepala desa yang berhasil memimpin, namun hal ini membatasi ruang bagi calon pemimpin di luar keluarga penguasa. Kepala desa tidak hanya mengelola sumber daya dan pembangunan, tetapi juga memanfaatkan otoritasnya untuk mendukung karier politik anggota keluarga. Transfer kekuasaan antar generasi ini didorong oleh hubungan darah, strategi politik, dan kontrol sumber daya desa. Ketika anak kepala desa terpilih sebagai anggota legislatif, hal ini mencerminkan bagaimana jaringan kekuasaan lokal berkembang menjadi kekuatan politik yang lebih besar, menciptakan basis kekuasaan yang stabil dan berkelanjutan. Sebagai aktor kunci, kepala desa berperan dalam menegakkan ketertiban, menyelesaikan konflik, meningkatkan perekonomian desa, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kuasa kepala desa mencakup kemampuan untuk memobilisasi massa, memengaruhi preferensi politik, mengelola informasi, dan membentuk citra positif. Semua faktor ini mendukung kelanggengan kekuasaan keluarga kepala desa dan memperkuat praktik dinasti politik di tingkat lokal (Rahma et al., 2022).

Dinasti politik terjadi ketika kekuasaan atau jabatan politik dilanjutkan oleh anggota keluarga, seperti anak atau kerabat dekat. Fenomena ini kerap muncul di masyarakat dengan ikatan sosial dan budaya yang kuat. Di satu sisi, keterlibatan keluarga kepala desa dapat dilihat sebagai upaya melanjutkan program yang telah dirintis, namun

di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terkait nepotisme dan ketidakadilan politik, karena peluang lebih banyak diberikan kepada keluarga tertentu.

Anak Kepala Desa Bua, Andi Azjumawangsh, terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dapil II (Kecamatan Tellulimpoe dan Sinjai Timur) melalui Partai Demokrat dengan suara terbanyak. Hal ini memunculkan pertanyaan; Apakah keterpilihannya murni karena kemampuan pribadi atau karena pengaruh posisi ayahnya sebagai kepala desa? Apakah masyarakat memilih berdasarkan kualitas atau loyalitas terhadap keluarga? Fenomena ini menunjukkan bahwa kuasa politik di tingkat desa dapat berdampak hingga level legislatif. Dinasti politik di tingkat lokal berpotensi mempengaruhi pola partisipasi dan perkembangan demokrasi, serta membatasi peluang politik bagi pihak di luar keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana pengaruh kuasa kepala desa terhadap keterpilihan anaknya sebagai anggota legislatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur politik lokal dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan. Pemahaman mendalam terhadap dinamika kuasa dan dinasti politik di desa penting untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan di wilayah pedesaan.

Michel Foucault memandang kekuasaan sebagai relasi yang tersebar dalam jaringan sosial dan bukan semata-mata dimiliki oleh satu individu atau institusi. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan, melainkan juga melalui mekanisme pengaruh, kontrol informasi, serta pembentukan wacana dan kebenaran. Dalam konteks kepala desa, kekuasaan tersebut dapat dijalankan melalui simbol otoritas, keberhasilan pembangunan, serta penggunaan sumber daya desa untuk memperkuat legitimasi dan loyalitas masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan kepala desa menjadi alat penting dalam membentuk citra politik keluarga, yang pada akhirnya memfasilitasi keterpilihan anaknya dalam arena politik yang lebih luas (Kebung, 2018).

Teori familisme juga relevan dalam memahami bagaimana relasi kekeluargaan memengaruhi keputusan politik masyarakat. Dalam banyak masyarakat pedesaan di Indonesia, nilai-nilai familisme seperti kesetiaan terhadap keluarga, solidaritas, dan kepercayaan antar anggota keluarga masih sangat dominan. Familisme memungkinkan terjadinya transfer kekuasaan secara halus dan diterima sebagai hal yang wajar oleh masyarakat, meskipun hal ini secara normatif bertentangan dengan prinsip meritokrasi dalam sistem demokrasi (Garzón, 2003). Fenomena politik dinasti di tingkat desa seperti ini perlu dikaji secara mendalam karena memiliki implikasi terhadap kualitas demokrasi lokal. Ketika kekuasaan hanya berputar dalam lingkup keluarga tertentu, hal ini tidak hanya membatasi akses politik bagi masyarakat lain yang memiliki kapasitas, tetapi juga berpotensi menurunkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Oleh

karena itu, penting untuk memahami bagaimana kuasa dan strategi kepala desa dimobilisasi untuk mendukung keterpilihan anggota keluarga dalam politik elektoral, serta sejauh mana hal ini mencerminkan gejala politik dinasti yang mengakar di masyarakat pedesaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses keterpilihan anak Kepala Desa Bua sebagai anggota legislatif di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada peran kuasa kepala desa dan praktik familisme sebagai faktor utama yang mendasari fenomena tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dan kerangka teori kekuasaan Foucault serta konsep familisme, tulisan ini mencoba memberikan pemahaman yang lebih tajam tentang bagaimana kekuasaan direproduksi dalam konteks lokal, dan bagaimana hal tersebut membentuk dinamika politik elektoral di tingkat desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, yang bertujuan memahami secara holistik fenomena relasi kuasa dan praktik politik dinasti di tingkat desa. Fokus kasusnya adalah keterpilihan anak Kepala Desa Bua sebagai anggota legislatif Kabupaten Sinjai tahun 2024, dengan menekankan konteks sosial serta dinamika kuasa dalam masyarakat desa. Lokasi penelitian berada di Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, yang dianggap representatif untuk menggambarkan masyarakat adat dan dinamika politik lokal. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci seperti kepala desa, sekretaris desa, anak kepala desa yang terpilih, ibu dari legislator, serta lima warga. Data sekunder berasal dari dokumen pemilu, arsip desa, serta laporan dan berita media lokal. Teknik pengumpulan data mencakup observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tiga tahap: reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif dan naratif. Untuk menjaga validitas, digunakan triangulasi, *member check*, peningkatan ketekunan, dan audit trail sebagai bentuk transparansi dan keabsahan ilmiah.

Pembahasan

Proses Keterpilihan Anak Kepala Desa sebagai Anggota Legislatif

Proses keterpilihan Andi Azjumawangsh, anak Kepala Desa Bua, sebagai anggota legislatif Kabupaten Sinjai bukan terjadi secara spontan atau hanya berdasarkan kapasitas individu. Hal ini merupakan hasil transfer kekuasaan yang berlangsung melalui hub-

ungan kekeluargaan dan jaringan sosial yang terbentuk selama masa kepemimpinan Kepala Desa Bua, Karaeng Asis. Menurut Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya dimiliki individu atau lembaga, tetapi tersebar melalui jaringan sosial, wacana, dan praktik yang mengatur masyarakat (Foucault, 2017). Dalam konteks ini, politik dinasti menunjukkan bahwa keluarga menjadi alat utama pembentukan kekuasaan, menciptakan jaringan kekuasaan terpusat yang diwariskan secara familial (Telaumbanua, 2024). Transfer kekuasaan melalui hubungan kekeluargaan mencerminkan bagaimana kekuasaan memproduksi dirinya sendiri. Kepala desa yang berkuasa menciptakan kondisi sosial-politik yang memberi legitimasi lebih besar kepada lingkarannya dibanding kandidat lain. Hal ini sejalan dengan konsep *governmentality*, yang menekankan bahwa kekuasaan bukan hanya kontrol langsung, tapi juga cara sistem sosial memungkinkan kekuasaan berlangsung secara 'alami' dan 'wajar' (Foucault, 2017).

Proses ini melibatkan strategi kampanye yang intens dan pendekatan personal, di mana calon turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan visi dan solusi atas permasalahan yang ada. Calon legislatif yang terpilih pun menekankan pentingnya persiapan dan interaksi langsung dengan warga, sehingga menciptakan kepercayaan bahwa ia merupakan kelanjutan alami dari kepemimpinan yang telah terbukti membawa perubahan positif di desa. Dengan demikian, proses keterpilihan anak kepala desa sebagai anggota legislatif merupakan manifestasi dari transfer kekuasaan yang kompleks di mana dukungan politik tidak hanya mengalir melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui jaringan emosional dan budaya politik lokal yang telah terinternalisasi dalam masyarakat Desa Bua. Pemilihan anggota legislatif di Desa Bua, menunjukkan fenomena politik dinasti dan pengaruh yang kuat, khususnya dalam keterpilihan anak Kepala Desa Bua sebagai anggota legislatif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa faktor utama keterpilihannya bukan hanya didasarkan pada kapasitas individu, tetapi juga pada jaringan kuasa yang telah dibangun oleh kepala desa sebelumnya atau bapaknya. Perspektif familisme, hubungan kekeluargaan menjadi faktor utama dalam penentuan kepemimpinan. Ini berarti bahwa kepala desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pusat jaringan patronase yang memastikan kesinambungan kekuasaan dalam lingkup yang terbatas. Familisme dalam konteks ini menunjukkan bahwa pemimpin yang berkuasa menggunakan modal sosial berbasis keluarga untuk mempertahankan kendali, memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam lingkup jaringan yang telah mereka bangun (Garzón, 2003).

Peneliti melihat bahwa kasus keterpilihan anak kepala desa menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga melalui struktur sosial yang memungkinkan transfer kekuasaan berbasis hubungan kekeluargaan

dan jaringan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam pemikiran Foucault tentang mekanisme kekuasaan dan konsep familisme. Dimana ada beberapa faktor dalam mendukung proses keterpilihan anak kepala desa sebagai anggota legislatif di Kabupaten Sinjai.

Persiapan Diri dan Pendekatan ke Masyarakat

Persiapan diri dan pendekatan kepada masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan seorang kandidat keberhasilan A. Azjumawangsh, anak Kepala Desa Bua, terpilih sebagai anggota legislatif Kabupaten Sinjai tahun 2024, tidak semata-mata karena pengaruh nama besar keluarganya. Ia menunjukkan keseriusan dalam membangun citra kepemimpinan yang kuat dengan aktif mengikuti kegiatan sosial, menyerap aspirasi warga, dan menunjukkan komitmen terhadap perubahan. Ia menyadari bahwa kehadiran langsung di tengah masyarakat jauh lebih berarti daripada sekadar dukungan keluarga, dukungan politik A. Azjumawangsh juga diperkuat oleh strategi kampanye yang terstruktur. Menurut A. Azjumawangsh, tim sukses dibentuk di setiap desa dengan koordinator yang aktif menyusun strategi dan melakukan pertemuan rutin. Pemasangan baliho di setiap dusun menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan popularitas dan pengenalan calon. Pendekatan ini menunjukkan konsolidasi politik yang rapi dan pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mendulang dukungan masyarakat.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori kekuasaan Michel Foucault, yang melihat bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi dalam bentuk dominasi langsung, tetapi juga melalui praktik sosial dan pembentukan wacana. Dalam konteks ini, anak kepala desa tidak hanya mengandalkan hubungan darah sebagai sumber kekuasaan, tetapi juga mengonstruksi citra dan legitimasi politik melalui interaksi sosial dan simbol-simbol yang dapat diterima masyarakat. Dengan aktif dalam kegiatan keagamaan, kepemudaan, dan ekonomi, ia membentuk narasi bahwa dirinya adalah figur yang kompeten dan representative. Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan teori familisme yang dikemukakan oleh Garzon, yang menjelaskan bahwa hubungan kekeluargaan dapat menjadi modal politik utama dalam proses pencalonan. Namun demikian, familisme tidak bekerja secara otomatis, melainkan perlu diperkuat oleh usaha kandidat dalam membangun jaringan sosial dan menyusun strategi pemenangan yang kontekstual. Dalam hal ini, anak kepala desa memperoleh keuntungan awal dari posisi ayahnya, tetapi tetap memerlukan usaha aktif untuk memperoleh kepercayaan masyarakat luas.

Aspek finansial juga menjadi elemen penting dalam kesuksesan pencalonan. Proses kampanye memerlukan biaya yang cukup besar, mulai dari pengadaan alat peraga hingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi. A. Azjumawangsh mengakui bahwa dukungan

dari keluarga dan jaringan sosial sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan logistik kampanye, terutama dalam konteks desa di mana sumber daya terbatas dan struktur politik cenderung bersifat informal.

Dari rangkaian proses ini, peneliti menilai bahwa reproduksi kekuasaan melalui politik dinasti tidak terjadi secara pasif, melainkan melalui serangkaian strategi dan kerja sosial-politik yang kompleks. Kandidat seperti A. Azjumawangsh berhasil membangun legitimasi politiknya tidak hanya karena status keluarganya, tetapi juga karena keterlibatannya dalam kegiatan masyarakat, pendekatan personal, serta strategi komunikasi yang tepat. Melalui tindakan-tindakan ini, kekuasaan tidak hanya diwariskan, tetapi juga dikonstruksi dan dinegosiasikan dalam ranah sosial dengan demikian, keberhasilan politik anak kepala desa menunjukkan bahwa kekuasaan lokal beroperasi dalam spektrum yang lebih luas dari sekadar dominasi struktural. Ia melibatkan jaringan sosial, simbol, modal budaya, dan narasi politik yang saling memperkuat. Analisis ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang praktik politik dinasti di desa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat direproduksi secara halus melalui praktik sosial sehari-hari yang dianggap wajar oleh masyarakat.

Dukungan Lewat Jaringan Patron-Klien

Dukungan yang diberikan kepada A. Azjumawangsh tidak bersifat koersif, tetapi terjalin melalui relasi timbal balik dan loyalitas. Masyarakat cenderung mendukung kandidat yang memiliki hubungan dekat dengan kepala desa karena dianggap memiliki akses lebih terhadap sumber daya desa. Dalam wawancara, beberapa warga menyebut bahwa kepala desa mengarahkan tokoh masyarakat untuk mendukung anaknya, meskipun tidak secara eksplisit tampil dalam kampanye. Strategi kampanye keluarga A. Azjumawangsh mencerminkan pendekatan yang terstruktur. Ibu dari A. Azjumawangsh menjelaskan bahwa keluarga besar terlibat aktif sejak awal, baik dalam kampanye maupun penggalangan suara. Kepala desa pun berperan dalam menjembatani komunikasi antara keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat. Walau tidak hadir langsung dalam kegiatan kampanye, pengaruhnya tetap menjadi penentu arah dukungan politik.

Politik dinasti atau dinasti politik menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat (Maydani et al., 2024), sehingga keterlibatan keluarga besar juga mencerminkan konsep familisme, di mana nilai-nilai kekeluargaan menjadi basis kuat dalam reproduksi kekuasaan. A. Azjumawangsh dipersiapkan sejak tahun 2019 untuk terjun ke dunia politik, mulai dari pendirian usaha agar dikenal masyarakat hingga berperan sebagai tim sukses saat ayahnya mencalonkan diri. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan diwariskan

dan dibentuk secara strategis dalam lingkup keluarga. Partisipasi perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam mendukung A. Azjumawangsh memperkuat legitimasi sosial politiknya. Warga melihat dirinya sebagai figur yang melanjutkan kepemimpinan ayahnya, membawa stabilitas dan kesinambungan pembangunan. Ini diperkuat oleh narasi yang dibangun bahwa calon dari keluarga kepala desa memiliki pemahaman dan akses lebih terhadap kebijakan desa. Beberapa informan menyatakan bahwa memilih A. Azjumawangsh adalah pilihan rasional karena ia dianggap sudah memahami desa dan dipercaya mampu melanjutkan program yang telah dijalankan kepala desa. Dukungan ini lahir dari kepercayaan kolektif terhadap kesinambungan kepemimpinan, bukan semata-mata pertimbangan kompetensi pribadi calon. Kepala desa memegang peran strategis dalam mobilisasi dukungan politik melalui jaringan sosial dan pengaruh simbolik. Karaeng Asis memanfaatkan posisi ini untuk mendorong keterpilihan anaknya sebagai anggota legislatif. Dukungan masyarakat terbentuk bukan karena paksaan, melainkan hubungan timbal balik dan loyalitas yang kuat, di mana warga percaya bahwa kandidat dekat dengan kepala desa memiliki akses lebih terhadap sumber daya desa. Strategi kampanye keluarga A. Azjumawangsh juga terorganisir dengan baik, melibatkan seluruh keluarga dan tokoh masyarakat, sementara kepala desa berperan sebagai jembatan komunikasi tanpa perlu tampil langsung dalam kampanye.

Fenomena ini mencerminkan konsep *governmentality* Michel Foucault, di mana kekuasaan berjalan melalui pengaruh sosial dan simbolik tanpa perlu kontrol langsung. Reproduksi kekuasaan keluarga ini juga memperlihatkan konsep familisme, dengan persiapan politik yang terencana sejak lama bagi A. Azjumawangsh. Dukungan warga didasarkan pada kepercayaan terhadap kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas pembangunan, bukan hanya kompetensi individu. Meskipun ada upaya netralitas dalam pemerintahan desa, dinamika sosial-politik dan kedekatan dengan pemimpin sebelumnya tetap menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan Masyarakat. Fenomena politik dinasti di Desa Bua memperlihatkan bahwa kekuasaan direproduksi melalui jaringan sosial dan konstruksi wacana. Dukungan masyarakat terhadap anak kepala desa menunjukkan bahwa kepemimpinan telah dinormalisasi sebagai sesuatu yang wajar diwariskan dalam lingkup keluarga. Ini sejalan dengan analisis Foucault bahwa kekuasaan bekerja melalui mekanisme wacana dan normalisasi sosial keseluruhan proses ini mencerminkan perpaduan antara teori kekuasaan Foucault dan konsep familisme, di mana dukungan politik tidak hanya berdasarkan rasionalitas elektoral, tetapi juga pada nilai sosial, budaya, dan loyalitas keluarga. Reproduksi kekuasaan di Desa Bua berjalan melalui strategi terencana, didukung struktur sosial yang mapan, serta persepsi publik terhadap kesinambungan kepemimpinan sebagai bentuk stabilitas lokal.

Menurut Michel Foucault, kekuasaan tidak bekerja secara langsung melalui pemaksaan, tetapi melalui relasi sosial dan mekanisme yang membentuk pola pikir masyarakat (Garzón, 2003). Dalam konteks ini, kepala desa membangun jaringan sosial yang menghubungkan dirinya dengan berbagai aktor penting di desa, seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, dan kelompok pemuda. Hubungan ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga politis, di mana kepercayaan yang telah terjalin dalam jaringan ini mempengaruhi preferensi politik masyarakat strategi kampanye dan mobilisasi massa

Strategi kampanye yang dilakukan oleh anak Kepala Desa Bua, Andi Azjumawangsh, tidak hanya bertujuan untuk meraih suara, tetapi juga membangun citra sebagai penerus kepemimpinan desa. Strategi ini meliputi pendekatan personal, keterlibatan dalam berbagai acara desa, serta penggunaan media lokal untuk membangun narasi tentang kesinambungan kepemimpinan. Kandidat juga memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai penghubung dalam memperluas dukungan politik dalam wawancara, A. Azjumawangsh menjelaskan bahwa ia aktif bergabung dengan komunitas anak muda, termasuk ikut nongkrong bersama mereka sebagai bagian dari pendekatan personal. Ia mengaku bahwa cara ini digunakan untuk membangun kedekatan dan menggalang dukungan. Strategi ini menunjukkan adanya usaha sadar untuk menciptakan hubungan emosional dan sosial yang kuat dengan pemilih, terutama generasi muda.

Wawancara dengan warga Dusun Bontolohe seperti Nisa menunjukkan pentingnya pendekatan personal dalam kampanye. Kehadiran kandidat di acara desa membangun kesan kepedulian dan memperkuat legitimasi sosial-politik. Menurut teori Michel Foucault, ini mencerminkan kekuasaan yang bekerja lewat praktik sosial dan wacana, bukan sekadar struktur formal. Kandidat menciptakan citra sebagai pemimpin ideal melalui produksi wacana yang halus dan tidak langsung strategi ini juga berhubungan dengan konsep familisme, di mana masyarakat lebih percaya kepada kandidat yang berasal dari lingkungan atau keluarga dekat. Kedekatan sosial lebih berpengaruh dalam menentukan dukungan politik dibanding kapasitas dan program kerja kandidat namun, keterpilihan anak kepala desa juga menimbulkan perdebatan. Sebagian warga menilai politik dinasti menghambat regenerasi dan membatasi ruang bagi kandidat lain. Meski begitu, dukungan sosial dan finansial membuat kandidat tetap unggul. Kemenangan A. Azjumawangsh di Dapil II memperlihatkan bahwa hubungan kekeluargaan dengan kepala desa memberi keuntungan signifikan dalam politik lokal. Tekanan sosial dan ketergantungan warga pada bantuan desa, sebagaimana disampaikan Risna dan Hardi, membuat mereka enggan bersikap kritis. Dalam perspektif Foucault, ini menunjukkan kekuasaan yang bekerja lewat relasi sosial dan konstruksi wacana, menjadikan dominasi terasa wajar. Dengan demikian, praktik patronase dan nilai familisme mem-

perkuat politik dinasti dan membentuk preferensi politik berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi.

Mencerminkan konsep *bio power* dari Foucault, dimana kepala desa menggunakan kebijakan dan program sosial (seperti pembangunan desa, bantuan sosial) untuk membangun loyalitas dan kepatuhan masyarakat. Kekuasaan kepala desa tidak dipaksakan secara langsung, tetapi bekerja melalui jaringan sosial dan wacana yang membuat masyarakat secara tidak sadar menerima bahwa anak kepala desa adalah figur yang “layak” untuk melanjutkan kepemimpinan. Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa proses keterpilihan anak kepala desa bukanlah suatu kejadian yang terjadi secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari sinergi antara kerja keras individu calon dengan transfer legitimasi dari figur otoritas yang sudah mapan. Dalam hal ini, hubungan kekeluargaan berfungsi sebagai saluran utama bagi terjadinya transfer kuasa, dimana dukungan masyarakat secara simbolis dan praktis mengalir dari keberhasilan yang telah dilakukan oleh kepala desa kepada penerusnya. Berdasarkan teori Foucault, kekuasaan kepala desa tidak hanya bekerja dalam bentuk aturan formal, tetapi juga melalui wacana sosial, kebijakan publik, dan jaringan sosial yang menciptakan legitimasi (Foucault, 2017). Anak kepala desa mendapat keuntungan dari legitimasi ini, sehingga keterpilihannya bukan hanya karena faktor individu, tetapi karena kekuasaan yang telah tertanam dalam sistem sosial desa.

Sementara itu, menurut teori familisme, keterpilihan anak kepala desa sebagai anggota legislatif mencerminkan bagaimana kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh satu individu, tetapi juga oleh hubungan kekeluargaan dan nilai loyalitas sosial. Familisme menjelaskan bagaimana dalam masyarakat desa, politik lebih dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan daripada meritokrasi atau persaingan terbuka. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses keterpilihan anak kepala desa di Desa Bua bukan hanya sekadar hasil pemilu biasa, tetapi merupakan bagian dari proses transfer kekuasaan yang sudah tertanam dalam struktur sosial dan budaya politik masyarakat setempat.

Peran Kepala Desa dalam Mendukung Keterpilihan Anaknya

Peran aktif kepala desa dalam memainkan peran penting dalam mendukung pencalonan anaknya melalui kekuasaan administratif, sosial, dan politik yang dimilikinya. Dukungan ini membangun jaringan, modal sosial, serta legitimasi politik yang kuat. Warga Desa Bua mengakui bahwa dukungan kepala desa memengaruhi pilihan politik mereka karena statusnya sebagai tokoh yang dihormati.

Menurut teori Michel Foucault, kekuasaan bekerja melalui wacana dan norma sosial, bukan sekadar paksaan. Maka, meski tidak eksplisit, dukungan kepala desa men-

ciptakan pengaruh kuat yang membuat masyarakat cenderung mengikuti arahan. Fenomena ini juga sejalan dengan konsep patron-klien, di mana kepala desa sebagai patron memberikan bantuan sosial, sementara masyarakat sebagai klien memberi dukungan politik sebagai balas jasa (Nastain & Nugroho, 2022). Pola ini memperkuat loyalitas politik serta posisi anak kepala desa dalam kontestasi lokal.

Kedudukan kepemimpinan sehingga pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam mempengaruhi masyarakat supaya bersedia berpartisipasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Jahira et al., 2023), sehingga kepala desa juga memobilisasi dukungan elemen masyarakat seperti tokoh agama dan Ketua RT/RW melalui forum-forum resmi, acara keagamaan, dan program pembangunan untuk memperkenalkan anaknya sebagai penerus kepemimpinan. Dalam masyarakat yang menjunjung nilai familisme, kepemimpinan sering dianggap wajar diwariskan dalam keluarga. Kepala desa berperan sebagai patron politik dengan jaringan sosial luas untuk mendukung keberhasilan anaknya. Pernyataan Kepala Desa Bua, menguatkan hal ini meski ia mengaku tidak berkampanye langsung, tetapi memberikan dukungan penuh. Kesaksian warga juga menyebutkan kepala desa memperkenalkan anaknya dalam berbagai kegiatan dan memfasilitasi komunikasi politik dengan pemilih. Ibu dari A. Azjumawangsh menambahkan bahwa sang kepala desa sejak awal membantu persiapan pencalonan anaknya, termasuk sosialisasi dan menjaga konsistensi dukungan. Anak kepala desa juga aktif dalam kegiatan desa, termasuk menjadi bagian tim sukses ayahnya, sebagai strategi membangun citra penerus ideal.

Dalam perspektif Michel Foucault, strategi kepala desa mencerminkan konsep *governmentality*, di mana kekuasaan bekerja melalui penciptaan wacana, norma sosial, dan legitimasi dalam masyarakat. Citra anak sebagai penerus kepemimpinan ayahnya menjadi konstruksi sosial yang diterima secara wajar. Program bantuan desa digunakan sebagai alat memperkuat hubungan timbal balik; masyarakat penerima bantuan merasa berkewajiban moral mendukung keluarga kepala desa. Hal ini sejalan dengan konsep patron-klien, di mana kepala desa sebagai patron memberi bantuan, dan masyarakat sebagai klien membalas dengan dukungan politik. Meski tidak terlibat langsung dalam kampanye, kepala desa memainkan peran strategis dalam membentuk opini publik dan menciptakan legitimasi politik, sehingga menjamin keberlanjutan kekuasaan keluarganya hingga tingkat legislatif. Penelitian juga menunjukkan praktik patronase di Desa Bua sangat kuat, dengan tekanan sosial yang mendorong warga mendukung anak kepala desa demi menjaga akses terhadap layanan dan bantuan.

Kekuasaan politik sebagai basis dominan mengalami perubahan signifikan dalam praktik politik (Fajar et al., 2024). Kepala desa bukan hanya pemimpin administratif

if, tetapi tokoh berpengaruh sosial yang memanfaatkan posisinya dan program desa untuk membangun citra positif anaknya. Berdasarkan wawancara dengan Risna, anak kepala desa memperoleh dukungan kuat karena reputasi ayahnya, dan keterpilihannya dianggap kelanjutan kepemimpinan yang sukses. Dukungan ini juga diperkuat oleh aparat desa dan jaringan keluarga yang menciptakan legitimasi kolektif, sejalan dengan teori Foucault tentang kekuasaan melalui wacana sosial dan teori familisme yang menjelaskan penerimaan masyarakat terhadap model kepemimpinan berbasis keluarga. Peran kepala desa sangat signifikan dalam mendorong keterpilihan anaknya melalui kekuasaan sosial, forum desa, dan program bantuan, menggambarkan praktik politik patronase dan relasi patron-klien di tingkat lokal, di mana kekuasaan diwariskan lewat hubungan keluarga dan kedekatan emosional, bukan hanya kompetensi individu.

Nilai familisme yang kuat di Desa Bua menjadikan pewarisan posisi politik dalam keluarga sebagai hal yang wajar. Kepala desa berhasil membangun legitimasi politik dan wacana kepemimpinan yang mendorong dukungan kolektif bagi anaknya. Meski tidak terlibat langsung dalam kampanye, pengaruh struktural dan simboliknya sangat signifikan, menjadikan keterpilihan anak kepala desa sebagai konstruksi sosial-politik untuk menjaga kesinambungan kekuasaan keluarga. Kepala desa memanfaatkan otoritas administratif dan jaringan sosial untuk membangun modal politik bagi anaknya. Dukungan masyarakat muncul secara otomatis karena kepercayaan yang terbentuk selama masa kepemimpinan kepala desa. Seperti yang diungkapkan warga, yakin anak kepala desa mampu melanjutkan program yang sudah berjalan. Dukungan ini berjalan melalui mekanisme sosial dan budaya, sesuai teori Foucault bahwa kekuasaan tak hanya koersif, tetapi juga membentuk norma dan cara pandang masyarakat. Relasi patron-klien memperkuat struktur dukungan yang bersifat politis, emosional, dan sosial (Nastain & Nugroho, 2022).

Kepala Desa Bua memobilisasi dukungan politik melalui tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, dan forum desa, termasuk acara keagamaan, untuk mengenalkan anaknya sebagai penerus. Keluarga turut mendukung dari sisi logistik kampanye dan membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Nilai familisme yang kuat membuat pewarisan kekuasaan dianggap wajar, terutama karena ketergantungan warga pada bantuan desa.

Konsep kekuasaan menurut Michel Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi kekuasaan bekerja melalui pembentukan norma dan pola pikir, bukan hanya paksaan (Wance & Djae, 2019). Strategi simbolik dan struktural kepala desa menciptakan legitimasi bagi anaknya, menjadikan keterpilihannya sebagai hasil konstruksi sosial-politik, bukan murni persaingan demo-

kratis. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterpilihan anak kepala desa lebih ditentukan oleh jaringan sosial, hubungan kekerabatan, dan pengaruh simbolik kepala desa dalam masyarakat yang menjunjung familisme, kandidat dari keluarga pemimpin sebelumnya dianggap mampu melanjutkan program dan memahami kondisi lokal. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kekuasaan di tingkat desa bersifat terstruktur dan sering diwariskan dalam keluarga sebagai bentuk stabilitas politik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, keterpilihan anak kepala desa sebagai anggota legislatif tidak semata-mata didasarkan pada kapasitas individu, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan jaringan sosial, hubungan kekerabatan, dan dukungan simbolik dari kepala desa sebagai pemegang otoritas lokal. Kepala desa memainkan peran penting dalam membentuk opini masyarakat, baik melalui mobilisasi tokoh masyarakat, penciptaan citra keberlanjutan kepemimpinan, maupun penguatan legitimasi politik anaknya dalam perspektif familisme, masyarakat cenderung mendukung kandidat yang berasal dari keluarga pemimpin sebelumnya karena dianggap lebih memahami kondisi lokal dan mampu melanjutkan program yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan bersifat terstruktur dan diwariskan melalui jaringan sosial dan hubungan kekeluargaan dengan demikian, proses politik di tingkat desa tidak sepenuhnya berlangsung secara kompetitif dan terbuka, melainkan berjalan dalam kerangka kekuasaan yang mengakar pada struktur sosial, di mana kepemimpinan sering diwariskan dalam lingkup keluarga sebagai bentuk stabilitas politik.

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan bahwa artikel ini benar karya asli yang bebas dari plagiarisme dan kami telah mencantumkan berbagai sumber referensi yang digunakan dalam penulisan artikel ini serta belum pernah dipublikasikan maupun sedang dikirimkan ke jurnal lainnya.

Referensi

Anzalia, B. A., Barus, D. A. H., Nababan, L. G., Hasibuan, N. H., & Ivanna, J. (2023). Analisis konsep kekuasaan dalam teori politik dan demokrasi. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 20(2), 410–415. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1217>

- Azzahra, F., & Sukri, I. F. (2022). Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah: Perimpangan antara hak asasi dan demokrasi. *Japhtn-Han*, 1(1), 105–119. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.27>
- Dwinugraha, A. P. (2020). Kepemimpinan politik kepala desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 117–125. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v5i2.4834>
- Fajar, F., Armin, A., & Saad, M. (2024, April). Global and regional political economy: The power of capitalist elites and material power after authoritarian regimes. In *World Conference on Governance and Social Sciences (WCGSS 2023)* (pp. 786–794). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-236-1_84
- Foucault, M. (2017). *Power/Knowledge: Wacana kuasa/pengetahuan*. Narasi.
- Garzón, A. (2003). Familism. In J. Ponzetti (Ed.), *International Encyclopedia of Marriage and Family*. MacMillan. <https://www.uv.es/garzon/adela/publicaciones/Familism.pdf>
- Jahira, J., Madani, M., & Haerana, H. (2023). Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tongkonan Basse Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(2), 368–384.
- Kebung, K. (2018). Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault dalam konteks ‘kekuasaan’ di Indonesia. *Melintas*, 33(1), 34–51. <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>
- Lestario, W. (2022). Politik dinasti dalam kepemimpinan desa. *Jurnal Sociopolitico*, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v4i1.58>
- Maydani, R., Husna, M. F., Winarti, S. L., Harahap, N., & Ardiansyah, A. (2024). Politik dinasti di negara demokrasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 950–955.
- Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi kuasa dan suara: Politik patron klien pada Pilkada langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 167–184. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.167-184>
- Nugroho, A., Sutaryono, S., & Subroto, T. (2016). *Relasi kuasa dalam strategi pertanian di Desa Prigelan*. STPN Press.
- Permana, R. (2020). *Politik dinasti di tingkat desa: Studi keluarga H. Duklam sebagai kepala desa (1990–2020) di Desa Kutayu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2260–2269.
- Telaumbanua, R. (2024). Dinasti politik dan kualitas demokrasi di pemerintahan daerah Indonesia: “Evaluasi dan perspektif. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 9(2), 55–67.

Wance, M., & Djae, R. M. (2019). Dominasi kuasa pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. *Aristo*, 7(2), 204. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i2.1607>